# MANAJEMEN PEMERINTAHAN PROGRAM *ONE VILLAGE ONE PRODUCT* (OVOP) OLEH PEMERINTAH DESA BENAI KECIL KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2018-2019

Oleh: Aini Hafizah

e-mail: ainihafizah98@gmail.com

Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

#### Abstract

Telp/Fax. 0761-63277

The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages is a great opportunity for the Village to progress, the Village which has been known as an area that is lagging behind in all aspects and a contributor to a fairly high poverty rate. The implementation of the OVOP Program in Indonesia itself still has many problems, including the absence of a clear policy regarding sanctions for regions that do not implement this program and the unclear structure of the responsibility relationship and division of roles.

This study used the management theory of the government according to George Terry. The management of the government has four functions, namely planning, organizing, implementing, and supervising. This research was qualitative. With descriptive qualitative method. This research took place in Desa Benai Kecil Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

The results showed that the Desa Benai Kecil Government in the One Village One Product (OVOP) Program in Desa Benai Kecil did not run well. Judging from the functions of Government Management according to George Terry, namely planning, organizing, implementing, and monitoring that do not work properly. This can be seen from the poor planning that was made, the division of roles and responsibilities that were not clear and firm, the objectives of the OVOP program being implemented in Desa Benai Kecil were not achieved, etc.

Keywords: OVOP Planning, OVOP Organizing, OVOP Implementation

## A. PENDAHULUAN

Konsep One Village One Product (OVOP) pertama kali diperkenalkan di Jepang pada tahun 1979 oleh M. Hiramatsu. Gubernur Oita<sup>1</sup>. Keberhasilan program ini di Jepang membuat banyak negara mencoba untuk mengadopsi konsep OVOP ini. One Village One Produt (OVOP) atau satu Desa satu produk adalah suatu pendekatan pengembangan potensi daerah suatu wilayah di untuk menghasilkan satu produk kelas global unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal<sup>2</sup>. Satu Desa dalam program OVOP ini dapat diperluas menjadi Kecamatan, Kabupaten/Kota maupun kesatuan wilayah lainnya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mencoba untuk mengadopsi konsep OVOP. Program OVOP ini sendiri merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan agenda NAWACITA yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Pelaksanaan Program OVOP di Indonesia sendiri masih terdapat banyak masalah, antara lain belum adanya kebijakan yang jelas mengenai sanksi bagi daerah yang tidak melaksanakan program ini, sehingga masih banyak daerah yang belum melaksanakannya ataupun tidak konsisten dalam melaksanakannya dan belum jelasnya struktur hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selaku Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pembangunan Desa memiliki program prioritas di Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2), yakni kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan Kewenangan Desa.

Program OVOP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pada tingkat Desa melalui serangkaian kegiatan-kegiatan usaha yang produktif guna peningkatan pendapatan masyarakatnya dan juga akan meningkatkan pendapatan asli Desa. Sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program OVOP, yakni<sup>3</sup>:

- 1. Kerjasama dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan;
- 2. Membangun kesinambungan berbagai aktivitas di pedesaan/daerah yang antara lain dapat dilaksanakan melalui manajemen rantai suplai, penempatan kelembagaan ekonomi dan peningkatan infrastruktur;
- 3. Menghasilkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para petani serta masyarakat disekitarnya; dan
- 4. Meningkatkan posisi tawar terhadap pasar untuk para petani/pelaku usaha.

Adapun progres yang di rasakan setelah dilaksanakan nya OVOP di Indonesia yakni sudah banyak Desa yang merubah status nya dari Desa sangat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mehmet Huseyin Bilgin, dkk. 2020. *Eurasian Economic Perspectives: Proceedings of The 28th Eurasia Business and Economics Society Conference*. Swiss: Springer Nature. Hlm 13

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Regi Refian Garis. 2017. Analisis Implementasi 4 Program Prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kabupaten

Ciamis (Studi Kasus pada Lima Desa di Kabupaten Ciamis). Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Vol. 3 No. 2. Hlm 120

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Menteri Negara Koperasi dan UKM RI. 2010. Blue Print One Village One Product. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM

tertinggal menjadi Desa yang berkembang maupun Desa maju. Selain itu, sudah ada Desa-desa yang mampu memberikan pemasukan bagi Desa nya dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat<sup>4</sup>.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program OVOP berperan sebagai fasilitator, membuat kebijakan teknis atau pelaksanaan, dan lain sebagainya<sup>5</sup>. Selain itu, Pemerintah Desa juga merupakan penanggungjawab dalam pelaksanaan program ini. Hal ini dikarenakan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program OVOP bersumber dari Dana Desa.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu daerah yang melaksanakan program OVOP atau Prudes berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 yang kemudian menjadi pedoman dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019.

Desa Benai Kecil merupakan salah satu Desa yang mendapat sorotan karena keberhasilan kelompok tani nya dalam membudidayakan tanaman hortikultural khususnya bawang merah. Dengan potensi yang dimiliki ini Desa Benai Kecil mampu merubah diri dari Desa tertinggal menjadi Desa berkembang<sup>6</sup>. Selain itu, keberhasilan dari kelompok

tani Desa Benai Kecil ini membuat Desa ini menjadi tempat kunjungan untuk melakukan study banding, baik dari Desa-desa tetangga maupun dari daerah luar Kabupaten Kuantan Singingi.

Kelompok Tani Beken Jaya telah mengembangkan bawang merah sejak tahun 2016. Namun, dana digunakan untuk mengembangkan bawang merah masih bersifat dana pribadi dari kelompok tani. Pada tahun 2019 Pemerintah Desa Benai Kecil melaksanakan Program OVOP/Prudes yang merupakan program prioritas dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan menyalurkan dana yang bersumber dari dana Desa.

Adapun mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana Desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 61 tahun 2018 tentang Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Pasal 10, yakni:

- Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa dan ditetapkan melalui musyawarah bersama.
- 2. Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

&feature=youtu.be
<sup>5</sup> Haryono. 2018. *Kebijakan Pemerintah Desa dalam* 

Rumah. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol. 6 Issue 1. Hlm 36

https://www.riaugreen.com/view/Kuansing/38078/M enyulap-Tanaman-Sayur-Menjadi-Taman-Wisata--Desa-Benai-Kecil-Kini-Menjadi-Desa-Berkembang.html#.YB7JY kxXIU

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> CNN Indonesia. 31 Juli 2018. Ini Rahasia Desa Tambah Maju-Prukades, Majukan Desa dengan Ciptakan Produk Unggulan. Di Akses pada 28 Juli 2020, dari <a href="https://www.youtube.com/watch?v=wYewplPbwgw">https://www.youtube.com/watch?v=wYewplPbwgw</a>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Haryono. 2018. Kebijakan Pemerintah Desa dalam Mempersiapkan Produk Unggulan Wilayah Pedesaan melalui Optimalisasi Pemanfaatan Perkarangan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hendri. *Menyulap Tanaman Sayur Menjadi Taman Wisata, Desa Benai Kecil kini Menjadi Desa Berkembang.* Diakses Oktober 26, 2019, dari RiauGreen:

- 3. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dituangkan dalam RKPDesa dan wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.
- 4. Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa.

Masyarakat Desa Benai Kecil melalui musyawarah Desa menetapkan tanaman hortikultural khususnya bawang merah sebagai produk unggulan dari Desa ini. Dipilihnya tanaman hortikultural khususnya bawang merah sebagai produk unggulan dikarenakan bawang merah merupakan kebutuhan pangan yang sering dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah melakukan musyawarah dan menetapkan tanaman hortikultural khususnya bawang merah produk unggulan, kemudian Program OVOP ini disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2019. Untuk (APBDesa) Tahun pelaksanaan program OVOP yang telah diatur dalam APBDesa Tahun 2019, Pemerintah Desa Benai Kecil menyalurkan dana yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 153,479,400 dalam kategori pemberdayaan masyarakat.

Hasil panen bawang merah Desa Benai Kecil belum mampu mencukupi kebutuhan pasar di Kabupaten Singingi apalagi kebutuhan pasar lebih luas. Hal ini dikarenakan keterbatasan lahan dalam mengembangkan bawang merah dan juga ada pembagian lahan dengan tanaman lain.

Tabel 1 Produktivitas Komoditi Bawang Merah Kelompok Tani

| No | Tahun | Luas<br>Lahan | Hasil<br>Panen     |
|----|-------|---------------|--------------------|
| 1. | 2018  | 0,8 Ha        | 11.200<br>kg/tahun |
| 2. | 2019  | 1,5 Ha        | 14.500<br>kg/tahun |

Sumber data : Kelompok Tani Beken Jaya

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa walaupun terjadi penambahan lahan pada tahun 2019, namun hasil panen tidak optimal sebab dengan lahan yang lebih luas dari pada tahun sebelumnya hasil panen Tahun 2019 dengan 2018 tidak berbeda jauh. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 yang pelaksanaan penanaman bawang merah menggunakan Dana Desa tidak tepat penyalurannya dengan musim tanam.

Walaupun Desa Benai Kecil bisa berhasil dikatakan dalam mengembangkan produk unggulannya. Namun, dalam pelaksanaan program OVOP masih terdapat penghambat. Hal ini dilihat dari kurang pahamnya aktoraktor vang terlibat khususnya Pemerintah Desa Benai Kecil dalam pelaksanaan OVOP, keterbatasan lahan, kurangnya sumber air untuk mengairi lahan, dan lain sebagainya.

Setelah melakukan observasi, peneliti menyimpulkan ada beberapa masalah yang terjadi di Desa Benai Kecil berkaitan dengan pelaksanaan program one village one product (OVOP), yaitu:

- 1. Kurangnya komitmen Pemerintah Desa dalam melaksanakan program OVOP di Desa Benai Kecil.
- 2. Kurangnya sosialisasi kepada Pemerintah Desa mengenai pelaksanaan OVOP.

- 3. Keterbatasan lahan dan kepemilikan lahan, keterbatasan sumber air, keterbatasan anggaran, dan keterbatasan tenaga kerja membuat kurang optimalnya pelaksanaan OVOP di Desa Benai Kecil;
- 4. Terjadinya *miscommunication* antara aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program OVOP.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian ini yaitu: "MANAJEMEN PEMERINTAHAN PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) OLEH PEMERINTAH DESA BENAI KECIL KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2018-2019".

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas Maka rumusan masalah dalam penelitian, yaitu:

- 1. Bagaimana Manajemen Pemerintahan dalam Program *One Village One Product* (OVOP) oleh Pemerintah Desa Benai Kecil Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018-2019?
- 2. Apa saja faktor-faktor penghambat Manajemen Pemerintahan Program One Village One Product (OVOP) oleh Pemerintah Desa Benai Kecil Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018-2019?

#### C. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen pemerintahan menurut George Terry. Menurut George Terry dalam buku Inu Management is distrinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources<sup>7</sup>.

Masing-masing fungsi saling

Kencana Syafiie menyatakan bahwa :

Masing-masing fungsi saling berkaitan dan membentuk suatu sistem di mana masing-masing unsurnya tidak boleh terlepas satu sama lainnya. Keempat fungsi manajemen tersebut harus dilakukan langkah demi langkah seperti berikut:

# 1. Perencanaan (*planning*);

Perencanaan pada dasarnya adalah langkah untuk menetapkan lebih dahulu seperangkat kegiatan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan<sup>8</sup>. Peran dan fungsi sebuah rencana dalam fungsi manajemen adalah sebagai dasar atau standar/ukuran untuk kegiatan evaluasi<sup>9</sup>. Perencanaan merupakan persiapan yang teratur dari setiap usaha untuk mewujudkan tujuan, sehingga unsurunsurnya terdiri dari tujuan, kebijakan, prosedur, program dan progress<sup>10</sup>.

# 2. Pengorganisasian;

Fungsi pengorganisasian yang meliputi penentuan dan pembentukan wadah atau organisasi serta pengaturan hubungan antara wadah-wadah tersebut. Prinsip organisasi yang penting adalah pembagian kerja, pendelegasian wewenang, dan koordinasi. Tujuannya agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam tahapan atau fungsi berikutnya, misalnya dengan mengurangi terjadinya over-lapping dan duplication of work<sup>11</sup>.

# 3. Pelaksanaan (actuating); dan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Inu Kencana Syafiie. 2015. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hlm 126

<sup>8</sup> Agus Lay. 2006. Manajemen pelayanan. Yogyakarta: Penerbit Andi. Hlm 7

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Zaidan Nawawi. 2019. *Manajemen pemerintahan*. Depok: Rajawali Pers. Hlm 37

Inu Kencana Syafiie. 2011. Manajemen Pemerintahan. Bandung: Pustaka Reka Cipta. Hal 82
 Zaidan Nawawi, Op. Cit.

Tanpa perencanaan dan pengorganisasian yang baik, maka fungsi pelaksanaan sulit sekali mencapai hasil seperti yang dikehendaki, betapa pun pelaksanaan suatu kegiatan itu dapat dilakukan secara tuntas. Pelaksanaan pada dasarnya adalah langkah untuk membuat orang berperan secara efektif dalam melakukan perangkat kegiatan yang ada.

# 4. Pengawasan (controlling).

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen pemerintahan untuk menjamin agar pelaksanaan kerja pemerintah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan pemerintahan, agar masyarakat serta warga bangsa mencapai keadaan adil makmur dalam waktu yang sudah ditentukan bersama<sup>12</sup>.

## D. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang kualitatif. digunakan adalah Jenis penelitian digunakan dalam yang penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Langkah ini peneliti harus mendeskripsikan suatu obvek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif<sup>13</sup>.

Penelitian ini berlokasi di Desa Benai Kecil. Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Desa Benai Kecil merupakan Desa yang lebih menonjol dalam bidang pertanian khususnya tanaman hortikultural dan merupakan pelopor budidaya bawang merah di Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga diharapkan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat Desa nya dan juga mampu memberikan pemasukan sendiri untuk Desa.

<sup>12</sup> Inu Kencana Syafiie, Op. Cit. Hlm 131

Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Informan Penelitian

| No. | Jabatan               | Jumlah |
|-----|-----------------------|--------|
| 1.  | Kepala Bidang         | 1      |
|     | Hortikultural Dinas   |        |
|     | Pertanian Kabupaten   |        |
|     | Kuantan Singingi      |        |
| 2.  | Pendamping Desa       | 1      |
| 3.  | PPL BPP Kecamatan     | 1      |
|     | Benai                 |        |
| 4.  | Kepala Desa Benai     | 1      |
|     | Kecil                 |        |
| 5.  | Sekretaris Desa Benai | 1      |
|     | Kecil                 |        |
| 6.  | Direktur BUMDes       | 1      |
|     | Karya Mandiri         |        |
| 7.  | Ketua Kelompok Tani   | 1      |
|     | Beken Jaya            |        |
| 8.  | Kepala Dusun          | 2      |
| 9.  | Anggota Kelompok      | 3      |
|     | Tani                  |        |

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

# E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Manajemen Pemerintahan dalam Program One Village One Product (OVOP) Oleh Pemerintah Desa Benai Kecil Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018-2019

# 1.1 Fungsi Perencanaan

Dalam merealisasikan sebuah kebijakan atau program pemerintah harus melakukan yang namanya perencanaan. Perencanaan ini berfungsi untuk mengontrol kebijakan atau program yang akan dilaksanakan berjalan sebagaimana mestinya sehingga tujuan dari

Albi Anggito dan Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak. Hlm 11

dilaksanakannya kebijakan atau program tersebut tercapai.

Pemerintah Desa Benai Kecil selaku pemegang kekuasaan untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan di Desa bersama masyarakat menetapkan untuk melaksanakan program *One Village One Product* (OVOP) menggunakan Dana Desa pada tahun 2019. Penetapan program dan produk yang menjadi unggulan Desa Benai Kecil yakni melalui musyawarah Desa.

Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program OVOP di Desa Benai Kecil bersumber dari Dana Desa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun Tentang Pedoman 2018 Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019. Kemudian, diatur dalam Anggaran Belanja Pendapatan dan (APBDes) oleh Pemerintah Desa Benai Kecil.

Walaupun perencanaan tersebut cukup baik karena keterlibatan masyarakat desa dalam memilih produk unggulan. Namun, masih terdapat kekurangan dalam perencanaan untuk melaksanakan dimana pembagian nya, peran, tanggungjawab, sanksi. dan meminimalisir kegagalan panen karena musim belum diperhitungkan dengan baik.

# 1.2 Fungsi Pengorganisasian

Setelah perencanaan selesai, maka hal berikutnya yang harus dilakukan adalah pengorganisasian. Hal ini bertujuan agar orang yang diberikan wewenang dan tanggungjawab paham akan kewajibannya sehingga tidak terjadi penyelewengan kekuasaan.

Berdasarkan perencanaan yang telah dibuat, bahwa pelaksanaan

program OVOP di Desa Benai Kecil bersumber dari Dana Desa. Maka, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kepala Desa yang merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa mempunyai peran sebagai penanggungjawab dalam penggunaan uang dalam program OVOP ini, agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

# 1.3 Fungsi Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Bupati Kuantan Singingi menetapkan pedoman teknis penggunaan dana Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019.

Pelaksanaan OVOP di Desa Benai Kecil di serahkan kepada Kelompok Tani Beken Jaya. Hal ini dikarenakan Bapak Yunisman selaku Ketua Kelompok Tani Beken Jaya dianggap mampu untuk melaksanakannya.

Hasil dari pelaksanaan OVOP di Desa Benai Kecil belum di rasakan sepenuhnya oleh kelompok tani apa lagi masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan penyaluran dana Desa pada tahun 2019 tidak sesuai dengan tanam musim bawang merah. Sehingga pada masa penanaman bawang merah yang kedua gagal diakibatkan curah hujan yang tinggi. Padahal pada tahun 2019 luas lahan untuk penanaman bawang merah mengalami peningkatan.

Tabel 3

# Produktivitas Komoditi Bawang Merah Kelompok Tani Beken Jaya

| No | Tahun | Luas<br>Lahan |
|----|-------|---------------|
| 1. | 2018  | 0,8 Ha        |
| 2. | 2019  | 1,5 Ha        |

Sumber data: Kelompok Tani

Berdasarkan wawancara bersama Ibuk Sinur Asia selaku Anggota Kelompok Tani Beken Jaya, mengungkapkan bahwa:

"Pelaksanaan tanam bawang merah itu bersifat gotong royong dan juga kan kemarin gagal panen jadi kami tidak dapat apa-apa. Kami ada mendapatkan bantuan juga yakni alat pembuat saus, traktor, dan sebagainya. Hanya saja yang paham dan pandai Pak Yunisman. Selain itu, Kepala Desa berperan hanya ya penyaluran dana Desa kemarin saja". (Hasil Wawancara pada tanggal 3 Oktober 2021)

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Martalinus dan Apmopliarno selaku Kepala Dusun Rambutan dan Dusun Danau Kompe yakni apakah ada dampak yang diberikan dengan adanya pelaksanaan program OVOP kepada masyarakat.

"Dampak dari nya ada program itu belum dirasakan sepenuhnya oleh desa sendiri maupun masyarakat itu sendiri. Untuk kelompok tani yang melaksanakan saja mungkin tidak semuanya yang merasakannya".

# (Hasil wawancara pada tanggal 29 September 2021)

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan program OVOP di Desa Benai Kecil belum berhasil. Hal ini dikarenakan tujuan dan sasaran tidak dirasakan sepenuhnya oleh penerima sasaran. Walaupun begitu, dilaksanakan nya program OVOP di Desa Benai Kecil telah merubah pola pikir baik masyarakat maupun pemerintah setempat bahwa di Kabupaten Kuantan bisa Singingi juga membudidyakan tanaman bawang merah. Selain itu, Desa Benai Kecil juga menjadi Desa percontohan bagi Desa-Desa lain untuk belajar membudidayakan tanaman hortikultural khususnya bawang merah.

# 1.4 Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan langkah untuk memastikan bahwa kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, demi mencapai tujuan bersama. Pengawasan dalam pelaksanaan program OVOP di Desa Benai Kecil dilakukan oleh Pemerintah Desa Benai Kecil itu sendiri. Bentuk pengawasan yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan OVOP di Desa Benai Kecil yakni tidak langsung. pengawasan Pengawasan tidak langsung yakni pengawasan dilakukan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Selain itu, pengawasan tidak langsung dapat dilihat dari berita, jurnal, atau media elektronik lainnya ataupun masyarakat. Bentuk laporan diberikan yang Kelompok Tani Beken Jaya yakni berupa dokumen rincian penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan OVOP di Desa Benai Kecil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yunisman selaku Ketua Kelompok Tani Beken Jaya keluar pernyataan sebagai berikut:

"Pemerintah Desa terkadang ada datang untuk melihat. Namun, karena sekarang sudah ada handphone jadi bisa lewat handphone. Mereka sering bertanya apa yang akan dibuat selanjutnya, apa yang dibutuhkan, ya

# seperti itu saja". (Hasil wawancara pada tanggal 14 Oktober 2021).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kurang tepat. Sebab, Pemerintah Desa tidak dapat menilai dengan baik apakah Pelaksanaan OVOP di Desa Benai Kecil yang dikelola oleh Kelompok Tani Beken Jaya sesuai atau tidak dengan tujuan yang akan dicapai.

# 2. Faktor Penghambat Manajemen Pemerintahan Program One Village One Product (OVOP) Oleh Pemerintah Desa Benai Kecil

#### 2.1 Komunikasi

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Benai Kecil kepada Kelompok Tani Beken Jaya yakni melakukan pembinaan dengan bekerjasama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan atau balai penyuluh pertanian sebab program OVOP di Desa Benai Kecil berbasis pertanian. Sebelum melakukan sosialisasi Pemerintah Desa akan bertanya kepada Kelompok Tani apa yang mereka butuhkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irpan, S.Sos. dengan pertanyan bagaimana bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Kelompok Tani Beken Java:

"Pemerintah Desa tentu semuanya bisa. Namun, Pemerintah Desa berusaha untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan. Misal Kelompok Tani mau melakukan program ini, namun mengalami kesulitan. Kami tentu akan bekerjasama dengan OPD maupun penyuluh pertanian untuk memberikan pembinaan". (Hasil

# wawancara pada tanggal 13 Oktober 2020).

Pertanyaan yang sama diberikan juga kepada Bapak Indra Winnora, A.Md selaku PPL balai penyuluh pertanian Kecamatan Benai:

"Kami terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan juga bertanya dengan kelompok tani apa yang mereka butuhkan. Untuk pembinaan kami biasanya melaksanakan 1 sampai 2 bulan sekali". (Hasil wawancara pada tanggal 30 September 2021).

# 2.2 Sumber Daya

Dalam pelaksanaan program OVOP sumberdaya manusia di Desa Benai Kecil masih terdapat permasalahan. Dimana dalam Pelaksanaan OVOP di Desa Benai Pemerintah Kecil Desa masih bingung menjalankannya, apa lagi untuk meneruskan nya kepada kelompok pelaksana.

Dalam pelaksanaan program OVOP di Desa Benai Kecil hanya Pak Yunisman saja yang paham dalam pengelolaan tanaman bawang merah pada tahap awal sebelum di tanam. Selain itu, yang terlibat dalam penanaman tanaman bawang merah hanya wanita paruh baya saja dan ituitu saja orang nya. Mengenai kurangnya sumberdaya manusia dalam pelaksanaan OVOP ini, Bapak Yunisman dalam hasil wawancara sebagai berikut:

"Kita dalam mengembangkan program ini kekurangan pekerja, pola pikir masyarakat yang masih menganggap jadi petani itu tidak ada untungnya membuat minat masyarakat disini kurang. Pemudapemuda nya pun tidak ada yang berpartisipasi". (Hasil wawancara pada tanggal 27 September 2021).

Kelompok Tani Beken Jaya mendapat bantuan alat seperti cultivator, mini traktor, dan lain sebagainya. Walaupun mendapatkan bantuan peralatan tersebut namun ternyata masih terjadi kekurangan peralatan. Peralatan yang dibutuhkan oleh Kelompok Tani Beken Jaya dalam pelaksanaan OVOP yakni sumur bor untuk mengairi tanaman. Keterbatasan sumur bor ini membuat pengeluaran lebih besar.

Program OVOP di Desa Benai Kecil dilaksanakan menggunakan anggaran yang bersumber dari dana Desa untuk tahun 2019. Berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Desa Benai Kecil Bapak Irpan yakni anggaran apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan program OVOP di Desa Benai Kecil.

"Anggaran yang digunakan dalam melaksanakan program OVOPbersumber dari dana Desa yang diatur dalam APBDes tahun 2019 bidang pada pemberdayaan masyarakat dengan dipilihnya komoditi bawang merah. Hanya saja, dapat sepenuhnya tidak melaksanakan program ini dengan dana Desa. Oleh sebab itu, maka saya sebagai Kepala Desa Benai Kecil harus pandai-pandai mencari sumber dana lain, seperti membuat proposal yang diberikan kepada dinas terkait maupun dengan pihak swasta". (Hasil wawancara 13 Oktober 2020).

Selain hasil wawancara di atas, Pak Yunisman selaku Ketua Kelompok Tani Beken Jaya memberikan pernyataan:

"Sumberdaya manusia untuk melaksanakan program tanam bawang merah kurang, sumur bor untuk mengairi lahan kurang, dan keterbatasan lahan. Ingin meminta bantuan lagi kita segan, takut nanti masyarakat cemburu karena bantuan ke kita terus. Pada saat melaksanakan tanam bawang merah dengan dana Desa kita jadi gagal panen. Hal ini dikarenakan saat uang keluar bertepatan dengan tidak musim tanam. Sedangkan kita harus melaksanakannya sehingga pencatatan anggaran jelas". (Hasil Wawancara 14 Oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sumberdaya manusia, sumber daya peralatan, sumber daya alam dan anggaran masih belum cukup. Hal ini terlihat dari tanggungjawab diberikan hanya kepada satu orang saja dan sumber anggaran yang digunakan hanya bersumber dari dana Desa saja dan itu hanya pada tahun 2019 saja dan belum mencapai sasaran yang telah ditentukan

# 2.3 Kebijakan

Pelaksanaan program OVOP di Benai Kecil dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Tahun 2018 tentang Nomor 61 Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019. Namun, belum ada Standard **Operating Procedures** (SOP) khusus yang disediakan oleh Kabupaten Pemerintah maupun Pemerintah Desa Benai Kecil itu petunjuk sendiri tentang teknis maupun petunjuk pelaksanaan program OVOP. Pelaksanaan OVOP di Desa Benai Kecil selama ini hanya berpedoman pada Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019. Sehingga dalam melaksanakan program OVOP sendiri masih terdapat hambatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Tesa selaku Kepala Bidang Tanaman Hortikultural Kabupaten Kuantan Singingi dengan pertanyaan Apakah ada peraturan yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam melaksanakan program OVOP:

"Untuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program OVOP disini belum ada hingga saat ini."(Hasil wawancara pada tanggal 30 September 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arqian Maulidi Adjisman, ST mengenai permasalahan kebijakan pelaksanaan OVOP memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Mau bagaimana lagi dari atas mengenai OVOP ini hanya peraturan tentang prioritas penggunaan dana desa. Kami saja tidak ada diberikan pembinaan, kami belajar sendiri pahami sendiri lalu kami memberi tahu kepada desa-desa ini program yang akan dijalani dan sebatas itu saja. Setelahnya pilihan desa tersebut mau melaksanakan atau tidak". (Hasil wawancara pada tanggal 27 September 2021).

## F. PENUTUP

# 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis manajemen pemerintahan program *one village one product* (OVOP) oleh Pemerintah Desa Benai Kecil Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018-2019 masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya faktor-faktor yang menghambat yakni:

 Program One Village One Product (OVOP) di Desa Benai Kecil tidak berjalan dengan baik. Dilihat dari fungsi Manajemen Pemerintahan

- menurut George Terry yakni pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini terlihat dari tidak baik nya perencanaan vang dibuat. pembagian peran tanggungjawab yang tidak jelas dan tegas, tidak tercapainya tujuan dilaksanakan program OVOP di Desa Kecil. dan lain Benai sebagainya.
- 2. Faktor penghambat manajemen pemerintahan program OVOP oleh Pemerintah Desa yakni komunikasi, sumber kebijakan. daya, dan Dimana permasalahan utama terletak pada kebijakan dimana belum adanya petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis dalam pelaksanaan OVOP di Desa Benai Kecil membuat pelaksanaan OVOP disana kurang efektif dan efisien.

# 2. Saran

Setelah dilakukan analisis dan sudah mendapatkan kesimpulan pada bagian sebelumnya, maka penulis memberikan saran yang dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih dan masukan agar kedepannya lebih baik. Adapun saran yang penulis berikan yaitu:

- Bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membuat kebijakan yang lebih jelas mengenai OVOP dan melakukan pembinaan yang rutin. Sehingga program OVOP yang merupakan program pembangunan nasional mampu dijalankan dengan optimal dan memberikan pemasukan negara.
- 2. Bagi Pemerintah Desa Benai Kecil dalam menjalankan suatu program, ada baiknya terlebih dahulu

memahaminya sehingga akan lebih mudah untuk meneruskannya kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan Pemerintah Desa Benai Kecil tetap memberikan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan program yang akan dijalankan agar tujuan dari pelaksanaan program dapat tercapai tersebut secara optimal. Selain iuga berkomitmen sepenuh hati dalam melaksanakan program OVOP.

#### Daftar Pustaka

- Anggito Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak
- Bilgin, Mehmet Huseyin, dkk. 2020.

  Eurasian Economic Perspectives:

  Proceedings of The 28th Eurasia
  Business and Economics Society
  Conference. Swiss: Springer
  Nature.
- Garis, Regi Refian. 2017. Analisis Implementasi 4 Program Prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kabupaten Ciamis (Studi Kasus pada Lima Desa di Kabupaten Ciamis). Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Vol. 3 No.2
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Haryono. 2018. Kebijakan Pemerintah
  Desa dalam Mempersiapkan
  Produk Unggulan Wilayah
  Pedesaan melalui Optimalisasi
  Pemanfaatan Perkarangan
  Rumah. Jurnal Kebijakan dan
  Manajemen Publik. Vol. 6 Issue 1.
- Lay Agus. 2006. *Manajemen pelayanan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Menteri Negara Koperasi dan UKM RI. 2010. Blue Print One Village One

- *Product.* Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM
- Nawawi Zaidan. 2019. *Manajemen* pemerintahan. Depok: Rajawali Pers
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019.
- Soimin. 2020. *Pembangunan Berbasis Desa. Malang*: Intrans Publishing.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Syafiie, Inu Kencana. 2015. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi
  Aksara
- CNN Indonesia. 31 Juli 2018. Ini Rahasia Desa Tambah Maju-Prukades, Majukan Desa dengan Ciptakan Produk Unggulan. Di Akses pada 28 Juli 2020, dari <a href="https://www.youtube.com/watch?v=wYewplPbwgw&feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=wYewplPbwgw&feature=youtu.be</a>
- Hendri. Menyulap Tanaman Sayur Menjadi Taman Wisata, Desa Benai Kecil kini Menjadi Desa Berkembang. Diakses Oktober 26, 2019, dari RiauGreen: https://www.riaugreen.com/view/

Kuansing/38078/Menyulap-Tanaman-Sayur-Menjadi-Taman-Wisata--Desa-Benai-Kecil-Kini-Menjadi-Desa-Berkembang.html#.YB7JY\_kxXI U